



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA


KPKNL
AMBON

Laporan Kinerja

Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Ambon

2023

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada

 0811-4704-007

 kpknlambon

 kpknl_ambon

 KPKNL Ambon

 www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon

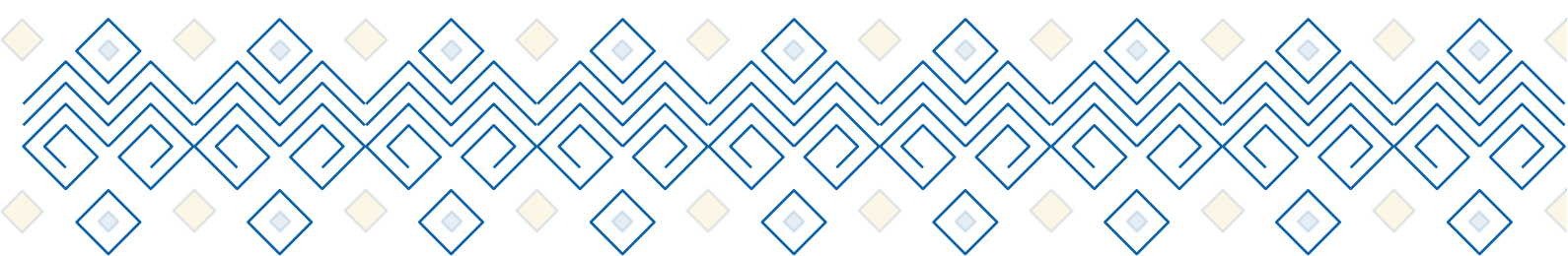
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja KPKNL Ambon disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Ambon di tahun 2023 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Ambon dilandasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.01/2016, dan telah diubah kembali dengan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara .

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KPKNL Ambon memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Pelayanan Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dalam penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Ambon tahun 2023 ini kiranya masih terdapat banyak kekurangan, ke depannya akan kami lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Demikian Laporan Kinerja KPKNL Ambon tahun 2023 ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran yang dibebankan kepada KPKNL Ambon pada tahun anggaran 2023.

Ambon, 9 Februari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Ambon



Ditandatangani secara elektronik
Iwan Victor Leonardo



Daftar Isi

Kata Pengantar

Kata Pengantar	ii
----------------	----

Pendahuluan

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
Sumber Daya Manusia	4
Sarana dan Prasarana	6
Peran Strategis	8
Permasalahan	9
Upaya Pemecahan Masalah	10

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	12
Penetapan Kinerja Tahun 2023	16
Pengukuran Kinerja	19



Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi 2023	21
Realisasi Anggaran	26



Penutup

Penutup	31
---------	-----------





BAB I | Pendahuluan

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya Manusia
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Peran Strategis
- E. Permasalahan
- F. Upaya Pemecahan Masalah



BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dimana Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon di bawah Lingkup Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku merupakan unit instansi vertikal DJKN terdiri dari 1 jabatan struktural eselon III (kepala kantor), jabatan eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri sebagai berikut.

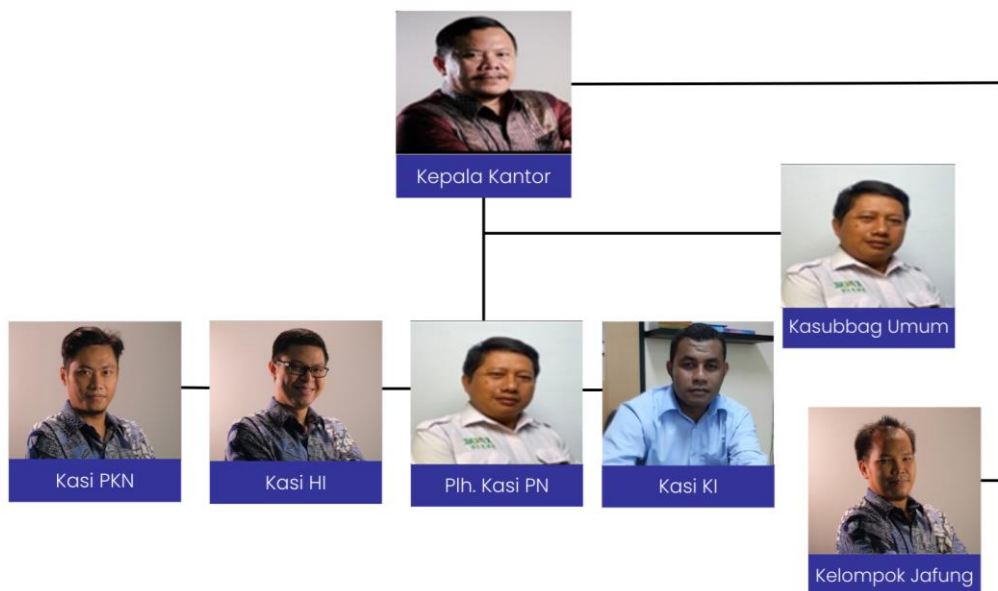
1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manus1a, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pehgadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Janngan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, peny1apan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan

pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon saat ini dapat dilihat pada Bagan I.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon



Penjelasan struktur organisasi KPKNL Ambon :

1. Kepala Kantor;
2. Kepala Sub Bagian Umum (Kasubbag. Umum), dengan 4 (empat) pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (Kasi PKN), dengan 3 (tiga) orang pelaksana;
4. Plt. Kepala Seksi Piutang Negara (Kasi PN), dengan 1 (satu) orang pelaksana;
5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi (Kasi HI), dengan 1 (satu) orang

pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan;

6. Kepala Seksi Kepatuhan Internal (Kasi KI), dengan 1 (satu) orang pelaksana; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah 3 (tiga) orang Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang 2 (dua) orang.

KPKNL Ambon berkedudukan di Jalan Raya Pattimura No. 18 (Gedung Keuangan Negara Lt. IV), Ambon, memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Prov. Maluku yang terdiri dari 2 (dua) Kota dan 9 (sembilan) Kabupaten, yaitu :

1. Kota Ambon
2. Kota Tual
3. Kabupaten Maluku Barat Daya
4. Kabupaten Kepulauan Tanimbar (dh. Kabupaten Maluku Tenggara Barat)
5. Kabupaten Kepulauan Aru
6. Kabupaten Maluku Tenggara
7. Kabupaten Maluku Tengah
8. Kabupaten Seram Bagian Barat
9. Kabupaten Seram Bagian Timur
10. Kabupaten Buru Selatan
11. Kabupaten Buru

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas ,penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau

- jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
 6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
 7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
 8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
 9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
 10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
 11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan;
 12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
 13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
 14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia sebagai unsur yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPKNL Ambon per tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 24 (dua puluh empat) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Ambon dapat dijelaskan pada tabel-tabel sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total orang
1	I	-	-	-
2	II	2	-	2
3	III	20	1	21
4	IV	1	-	1

2. Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Jml	Eselon			
		Peg	II	III	IV	Pelaksana
1	Kepala Kantor	1		1		
2	Subbagian Umum	5			1	4
3	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	4			1	3
4	Seksi Piutang Negara	1				1
5	Seksi Hukum dan Informasi	3			1	2
6	Seksi Kepatuhan Internal	2			1	1
7	Kelompok Jabatan Fungsional	6				
Total		22		1	4	11

3. Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Jml	Golongan			
		Peg	I	II	III	IV
1	SLTA	1			1	
2	D I	1		1		
3	D III	2		2		
4	D IV / S1	14			14	
5	S2	3			3	
6	S3	1				1
Total		22		3	20	1

4. Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pelelang/Pejabat Lelang	2
2	Penilai Kekayaan Negara	3
3	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
Total		6

C. SARANA DAN PRASARANA

KPKNL Ambon berlokasi di Jalan Raya Pattimura No. 18 (Gedung Keuangan Negara Lt. IV), Ambon. Ruang kerja yang digunakan oleh KPKNL Ambon adalah salah satu ruang Gedung Keuangan Negara Ambon di Lantai 4 yang digunakan sejak tahun 1995 dengan luas ruang kantor 1.572 m² dengan pembagian ruang kerja sebagai berikut : Ruang Area Pelayanan Terpadu (APT) yang dilengkapi dengan CCTV, ruang tunggu, ruang Kepala KPKNL, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Piutang Negara, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pelayanan Penilaian, ruang Kepala dan Pelaksana Sub Bagian Umum, ruang Bendahara Pengeluaran, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal, ruang Gudang ATK, ruang Rapat, ruang Sekretariat, ruang Server, ruang BKPN, ruang Minut Risalah Lelang dan kamar mandi/toilet Ruang Pertemuan (Aula), ruang Konsultasi, ruang Laktasi (menyusui), ruang Bendahara Penerimaan, ruang Arsip dan ruang dapur (*Pantry*) serta kamar mandi/toilet;

Disamping itu, KPKNL Ambon memiliki sarana dan prasarana penunjang guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi berupa :

1. Kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 (satu) unit roda empat;
2. Kendaraan operasional sebanyak 4 (empat) unit roda empat dan 4 (empat) unit sepeda motor;
3. Komputer (PC) sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit, laptop 21 (dua puluh satu) unit, Tablet PC 1 (satu) unit dan 10 (sepuluh) unit Local Area

- Network (LAN);
4. Printer sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit, 3 (tiga) unit scanner, 1 (satu) unit Monitor, 1 (satu) unit Hub, 1 (satu) unit CAT 6 Cable, 6 (enam) unit Wireless Access Point; 1 (satu) unit Switch, dan 6 (enam) unit Peralatan dan Jaringan Lainnya;
 5. Portable Generating Set sebanyak 1 (satu) unit;
 6. Wheel meter sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) unit Distance meter;
 7. Mesin Fotocopy Elektronik sebanyak 1 (satu) unit; 43 (empat puluh tiga) unit Lemari Besi/Metal; 7 (tujuh) unit Lemari Kayu; 29 (dua puluh sembilan) unit Rak Besi; 24 (dua puluh empat) Filing Cabinet Besi; 3 (tiga) unit Brandkas; 1 (satu) unit Roll Opek; 12 (dua belas) unit CCTV; 3 (tiga) unit Papan Visual/Papan Nama; 8 (delapan) unit Alat Penghancur Kertas; 3 (tiga) unit Mesin Absensi; 1 (satu unit) Headmachine Besar; 2 (dua) unit LCD Projector/Infocus; 2 (dua) unit Focusing Screen/Layar LCD Projector; 3 (tiga) unit Kotak Surat; 1 (satu unit) Mesin Antrian; dan 1 (satu) unit Papan Pengumuman;
 8. Meja Kerja Besi/Metal sebanyak 3 (tiga) unit; 47 (empat puluh tujuh) Meja Kerja Kayu; 169 (seratus enam puluh sembilan) Kursi Besi/Metal; 3 (tiga) unit Sice; 9 (sembilan) unit Meja Rapat; 1 (satu) unit Kasur/Spring Bed; 1 (satu) unit Meubelair Lainnya; 2 (dua unit) A.C. Sentral; 16 (enam belas) unit A.C. Split; 3 (tiga) unit Portable A.C.; 7 (tujuh) unit Televisi; 2 (dua) unit Sound System; 13 (tiga belas) unit Unit Power Supply; 2 (dua) unit Dispenser; 2 (dua) unit Handy Cam; 1 (satu) unit Karpet; 70 (tujuh puluh) unit Vertikal Blind; 7 (tujuh) unit Gordyin/Kray; 1 (satu) unit Kabel; 4 (empat) unit Bracket Standing Peralatan; dan 2 (dua) unit Alat Rumah Tangga Lainnya;
 9. Microphone/Wireless MIC sebanyak 1 (satu) unit; 2 (dua) unit Uninterruptible Power Supply (UPS); 1 (satu) unit Digital LED Running Text; 2 (dua) unit Camera Digital; 1 (satu) unit LCD Monitor; 1 (satu) unit Video Splitter; 1 (satu) unit End Point Vicon; 3 (tiga) unit GPS Receiver; dan 2 (dua) unit Pesawat Telephone;
 10. Rumah dinas untuk para pejabat sebanyak 8 (delapan) unit yang berdiri diatas dua bidang tanah KPKNL Ambon, yang berstatus Hak Pakai. Rumah dinas tersebut terdiri dari : 1 (satu) unit Rumah Dinas Kepala kantor ukuran 70 m² dan 7 (tujuh) unit Rumah Dinas untuk kasubbag umum dan para kepala seksi dengan ukuran masing- masing 50 m².

11. Pagar Permanen sebanyak 2 (dua) unit.
12. Monografi sebanyak 11 (sebelas) unit.

D. PERAN STRATEGIS

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi DJKN di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang dan Pelayanan Lelang, KPKNL Ambon memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran Strategis KPKNL Ambon di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara adalah mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Ambon juga memiliki tugas melaksanakan Penilaian Aset (BMN) yang berperan strategis untuk menyediakan informasi nilai wajar sekaligus analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*Highest and Best Use* atau HBU).

2. Memberikan pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Ambon di bidang Pengurusan Piutang Negara adalah penyelamatan keuangan Negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* (NPL) menjadiah aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan melalui proses penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan unit lain sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Memberikan pelayanan Lelang

KPKNL Ambon berperan dalam pelayanan lelang baik lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi. Dengan keuntungan yang ditawarkan yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Diharapkan KPKNL dapat ikut berperan mendukung penyelesaian kredit macet melalui *disposal asset*.

Seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi informasi maka metode penjualan barang melalui lelang juga turut berkembang, salah satunya implementasi penjualan lelang melalui internet (*e-auction*).

Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Ambon senantiasa mengupayakan penggalan lelang secara terus-menerus baik lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi, sehingga lelang menjadi salah satu sarana jual beli yang diminati masyarakat dan juga menjadi salah satu terobosan untuk ikut sertadalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.

4. Memberikan kontribusi pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang Negara, KPKNL Ambon memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Ambon memperoleh hasil bea lelang termasuk biad lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP.

E. PERMASALAHAN

1. Permasalahan Internal:

- a. sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional yang kurang memadai dari segi kuantitas untuk sebuah KPKNL yang mempunyai wilayah yang cukup luas se-provinsi Maluku dengan *stakeholder* yang cukup banyak;
- b. Wilayah kerja KPKNL Ambon yang cukup luas dan berupa kepulauan di Provinsi Maluku serta pulau-pulau kecil dan jauh lainnya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menjangkaunya.;
- c. Potensi lelang yang ada masih belum dapat dioptimalkan, karena kurangnya minat peserta lelang untuk mengikuti penjualan barang. Hal ini merupakan dampak dari minimnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait lelang seperti penyediaan dan peningkatan fasilitas layanan pada ruang layanan, penyediaan fasilitas hotline lelang, dan membuat banner-banner informasi proses pelaksanaan lelang, sehingga memberikan kemudahan bagi stakeholder dalam mengakses layanan lelang;
- d. Tidak disampaikannya data PNBP Pemanfaatan dan Cost-Having (Hibah) oleh satuan kerja berakibat pada tidak tercapainya realisasi

nominal PNBPN aset walaupun secara akumulasi, IKU terkait persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara dapat tercapai;

- e. sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dirasa masih kurang, PC, Laptop terkhusus rumah dinas bagi pegawai yang sangaj jauh dari homebase dll.

2. Permasalahan Eksternal:

- a. kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja KPKNL Ambon yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut atau udara.
- b. tingkat keamanan yang kurang kondusif di beberapa wilayah kerja KPKNL Ambon karena konflik antar masyarakat;
- c. adanya aturan atau regulasi lokal yang kurang mendukung tercapainyatarget kinerja KPKNL Ambon; dan

F. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

1. Pemecahan Permasalahan Internal:

- a. telah diajukannya permohonan penambahan pegawai Fungsional ke kantor pusat DJKN serta mengirimkan pegawai KPKNL Ambon ke berbagai diklat dan sosialisasi/workshop. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM di KPKNL Ambon juga sering mengadakan sendiri sosialisasi dengan mendatangkan narasumber dari luar maupun narasumber dari internal;
- b. mengajukan permohonan penambahan pagu Anggaran pada saat penyusunan RKAKL atau melakukan penghematan anggaran; dan
- c. mengajukan permohonan penambahan Pagu Anggaran khususnya untuk jenis belanja modal dan belanja barang.

2. Pemecahan Permasalahan Eksternal
 - a. mengajukan permohonan penambahan anggaran biaya perjalanan dinas, mengadakan acara/kegiatan kedinasan yang dipusatkan di satu tempat dan memanggil/mengumpulkan *stakeholder* di satu tempat (yakni di Aula KPKNL Ambon);
 - b. mengadakan sosialisasi atau pelatihan untuk *stakeholder* serta membuka layanan konsultasi yang berkaitan dengan tupoksi KPKNL Ambon melalui luring maupun daring;
 - c. lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas, dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung resiko kerawanan tinggi;
 - d. meningkatkan kemampuan para pegawai KPKNL Ambon khususnya yang pendatang (bukan Orang Asli Maluku/Ambon), untuk memahami/menyelami berbagai macam kearifan lokal yang ada di wilayah Maluku; dan
 - e. tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mengoptimalkan sarana digital dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.



BAB II | Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2023
- C. Pengukuran Kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : KEP-245/KN/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2023-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan visi DJKN, yaitu **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat"**. Pengertian **profesional** dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. **akuntabel** artinya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

1. Misi

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi yaitu:

- a. mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- c. meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- d. menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
- e. mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif, sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

2. Tujuan

- a. Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif sertamemberi manfaat finansial dan sosial;
- b. pelayanan Lelang yang modern dan terpercaya;
- c. pelayanan Penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
- d. birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

3. Sasaran

- a. mempercepat penyelesaian kasus Piutang Negara dan pencapaiantarget IKU;
- b. tercapainya mekanisme pengelolaan barang jaminan yang efektif, efisien dan terpercaya;
- c. meningkatkan kualitas Pelayanan Lelang;
- d. meningkatkan pengelolaan data dan meminimalisasi perkara hukum;
- e. melakukan Inventarisasi Kekayaan Negara secara menyeluruh, untukmeningkatkan manfaat dari kekayaan negara serta utilisasi kekayaan negara secara umum;

- f. melaksanakan Penilaian Kekayaan Negara sehingga diketahui nilai riil kekayaan negara; dan
- g. meningkatkan dukungan teknis dan administrasi KPKNL Ambon.

4. Kebijakan dan Program Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui kebijaksanaan dan program.

a. Kebijakan

Kebijakan Pengurusan Piutang, Lelang, Kekayaan Negara dan Penilaian Kekayaan Negara telah ditetapkan meliputi:

- 1) peningkatan kualitas pelayanan pengurusan Piutang Negara
- 2) peningkatan pengelolaan barang jaminan
- 3) peningkatan kualitas Pelayanan Lelang
- 4) peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan pengurusan Piutang Negara dan lelang serta pengoptimalan penanganan perkara
- 5) optimalisasi Barang milik Negara
- 6) penilaian Kekayaan Negara
- 7) peningkatan pemberian dukungan teknis dan administratif KPKNL Ambon; dan
- 8) melaksanakan cara kerja *New Normal* dalam melaksanakan tugas(rapat daring, WFO, WFH, dan WFHB).

b. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijaksanaan yang dijalankan oleh KPKNL Ambon diuraikan dalam program sebagai berikut :

- 1) percepatan pelayanan Pengurusan Piutang Negara;
- 2) pengaman barang jaminan;

- 3) percepatan pelayanan Lelang;
- 4) mengoptimalkan sistem administrasi data Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang, dan Lelang;
- 5) mengoptimalkan upaya penyelesaian Perkara;
- 6) pelayanan di Bidang Umum yang meliputi: Kepegawaian, Keuangan, dan TURT;
- 7) tertib administrasi BMN;
- 8) optimalisasi utilisasi kekayaan negara; dan
- 9) Penilaian BMN.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Ambon harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Ambon. Sasaran Strategis KPKNL Ambon Tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Ambon tersebut di atas.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	
			Kuantitas/Output	Kualitas/Mutu
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif Akuntabel dan Berkelanjutan	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100,00%	100
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	100
		Indeks Integritas	88,67	100
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100,00%	100
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100,00%	100
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100,00%	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	
			Kuantitas/Output	Kualitas/Mutu
4	Pengelolaan Kekayaan Negaradan Lelang yang Optimal	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100,00%	100
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100,00%	100
		Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68,00%	100
		Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100,00%	100
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil Penilaian	25,00%	100
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang secara <i>Online</i>	90%	100
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	100
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	100
8	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	
			Kuantitas/Output	Kualitas/Mutu
9	Penguata pengawasan pengendalian internal yang efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	100
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	100
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	100

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2019, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding denganyang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannyaditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian targetindikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*. IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan
2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi/Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.



BAB III | Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi 2023
- B. Realisasi Anggaran



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2023

No.	Nama IKU	NKO	WARNA	Penanggung Jawab
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	116,49%		Seksi PKN, Lelang, PN
2	Persentase Produktivitas Lelang	102,28%		JF Pelelang
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	85,46%		JF Pelelang
4	Indeks Integritas Organisasi	88,67		KPKNL Ambon
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	120%		Seksi PN
6	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	99%		JF Pelelang
7	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJKN	106,40%		KPKNL Ambon
8	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	120.09%		Seksi PKN
9	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	150.97%		Seksi PKN
10	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	120%		Seksi PN
11	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	120.00%		Seksi PKN
12	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	120.00%		PFPP
13	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	96,23		PFPP
14	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	98.92%		Seksi PKN
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	120%		Subbag Umum
16	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	93,68		Seksi KI
17	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	85		Subbag Umum dan Seksi KI
18	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100		Subbag umum
19	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	120%		Subbag Umum
20	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	0%		Subbag Umum dan Seksi PN
Total		114,23%		

Dari hasil pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu Three KPKNL Ambon tahun 2023 sebagaimana diatas, maka untuk evaluasi dan analisis kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

SS 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang TerhadapPerekonomian

1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang 116,49%
2. Persentase produktivitas lelang 102,28%
3. Indeks Integritas Organisasi 88,67

Realisasi penerimaan negara dan pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2023 sebesar Rp12.399.095.057,33,00 atau sebesar 116,49% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.644.000.000,00.

SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

1. Persentase Realisasi Pokok Lelang 85,46%
2. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara 120%

Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang sebesar 85,46% atau sebesar Rp180,404,244,048.00, dari Target sebesar Rp211.103.493.000,00 tersebut belum dapat tercapai karena pelaksanaan lelang Pegadaian yang kurang maksimal diharapkan kedepannya akan terus dilakukan penggalan potensi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kelebihan lelang.

SS 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJKN

Realisasi indeks kepuasan pelanggan layanan KPKNL pada tahun 2023 sebesar 106,40% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hasil ini diperoleh berdasarkan hasil survei pihak eksternal yang dilakukan oleh Tim dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang telah dilakukan dan penyebarankuesioner terhadap *stakeholder*, dimana hasilnya menunjukkan tren positif dengan meningkatnya tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan yang dilakukan KPKNL Ambon.

SS 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK 120,09%
2. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan 150,97%
3. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) 100%
4. Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) 120,00%

Tahun 2023 IKU dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal semuanya mencapai target bahkan melampaui target, hal ini disebabkan realisasi:

- a. pemahaman yang baik oleh satker tentang pentingnya pengelolaan BMN secara tertib khususnya terhadap BMN berupa tanah;
- b. terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antara KPKNL Ambon, Kanwil BPN Maluku serta Satker-satker dalam hal kerjasama pengelolaan BMN secara tertib;
- c. segala permasalahan dapat dimitigasi dengan baik oleh KPKNL Ambon

SS 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

1. Deviasi ketergunaan hasil penilaian 0,00%.

Tahun 2023 IKU dari Deviasi ketergunaan hasil penilaian mendapatkan capaian 0,00% dari target sebesar 15%.

SS 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

1. Persentase Pelaksanaan Lelang Online 102,28%;
2. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN 0%.

Pada tahun 2023 realisasi dari Persentase Pelaksanaan Lelang Online 102,28% dari target 90% dan realisasi deviasi data PNBP Fungsional DJKN sebesar 0% dari target 15%.

SS 7: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

1. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara 98,92%
2. Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2023 realisasi dari persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2023 terealisasi 96,36% dari target 85%.

SS 8: SDM yang Kompeten

1. Persentase pengembangan kompetensi pegawai 100%.

Realisasi dari persentase pengembangan kompetensi pegawai mencapai 120% dari target sebesar 100%, hal ini terjadi karena pengelolaan kinerja pada KPKNL Ambon berbasis BSC. Capaian ini menunjukkan perhatian yang tinggi dari Kepala KPKNL Ambon terhadap kebutuhan pegawai yang mempunyai kemampuan dan keahlian tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, dibuktikan dengan banyaknya dan seringnya pegawai ditugaskan untuk mengikuti berbagai diklat dan sosialisasi.

SS 9: Organisasi yang Fit For Purpose

1. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM 92,88%;
2. Nilai review pengelolaan kinerja 94,38%
3. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator 99,05%

Realisasi dari Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM di tahun 2023 tercapai sebesar 92.88 dari target 75. Keberhasilan ini merupakan wujud KPKNL Ambon untuk membangun Zona Integritas serta memberikan pelayanan yang terbaik dan bebas korupsi kepada *stakeholder*.

SS 10: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 96,69%
 2. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 119,00%
-

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 terealisasi sebesar 96,69% dari target 95.5%.

Capaian yang diraih oleh KPKNL Ambon dalam waktu 4 tahun terakhir mengalami naik turun. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor umum yaitu:

1. adanya pandemi Covid-19 membuat capaian pada 2020 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2021 dan 2023 mengalami perbaikan seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kerja keras KPKNL Ambon dan para *stakeholder*, dan
2. Indikator Kinerja Utama yang setiap tahun selalu mengalami pembaruan dan lebih menantang sehingga memerlukan waktu adaptasi dalam proses pencapaiannya.

Meskipun dengan berbagai hambatan dalam mencapai target kinerja, seluruh jajaran KPKNL Ambon memberikan kinerja terbaik sehingga mendapatkan capaian yang maksimal.

Guna menunjang kinerja KPKNL Ambon, berbagai inovasi layanan juga disusun agar memberikan kemudahan menjangkau *stakeholder*. Adapun beberapa inovasi layanan yaitu:

1. Aplikasi PN (SEMANGAT);
2. Aplikasi Monitoring Penilaian;
3. *Whatsapp Information Center*;
4. *Dashboard* Layanan Katong;
5. Layanan Klinik Pengelolaan BMN;

6. Percepatan SOP;
7. Aplikasi Natsepa; dan
8. Dashboard yang memberikan data capaian kinerja.

Selain itu, pada tahun 2023 KPKNL Ambon juga memperoleh predikat Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Hal tersebut tercapai karena kinerja dan komitmen seluruh jajaran KPKNL Ambon untuk memberikan pelayanan kepada *stakeholder* dengan berlandaskan integritas. Selanjutnya, tentu saja KPKNL Ambon akan berusaha mempertahankan predikat ZI-WBK dan mempersiapkan diri untuk pembangunan ZI-WBBM.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran KPKNL Ambon di tahun 2023 adalah sebesar 2.044.362.195,- atau 91,05% dari Pagu yang disediakan sebesar Rp2.245.199.000,-. Pada tahun 2024 KPKNL Ambon mendapat alokasi pagu DIPA sebesar Rp2.006.539.000,- yang terdiri dari belanja barang Rp1.718.557.000,- dan belanja modal Rp287.982.000,-.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan melalui Indikator Kinerja kegiatan yang ada dibiayai dari DIPA Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Capaian Keluaran Dan Capaian Komponen

No	Rincian Output	Postur Anggaran Eksisting (per 30 September 2023)				Prognosa Postur Anggaran Akhir Tahun (per 31 Desember 2023)			
		Pagu	Realisasi Anggaran	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Usulan Pagu Akhir	Realisasi Anggaran	Target Volume RO	Realisasi Volume RO
1	4796.AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	6.147.000,00	4.060.100,00	70	130	6.147.000,00	4.060.100,00	70	130
2	4796.AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	4.757.000,00	3.290.000,00	15	30	4.757.000,00	3.290.000,00	15	30
3	4798.AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	37.944.000,00	33.678.461,00	50	195	37.944.000,00	33.678.461,00	50	195
4	4798.AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	40.584.000,00	34.437.333,00	7	8	40.584.000,00	34.437.333,00	7	10
5	4798.AAH.003 Rivalah Lelang	16.704.000,00	13.890.100,00	100	138	16.704.000,00	13.890.100,00	100	138
6	4798.AAH.301 Rivalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	40.000.000,00	33.223.135,00	18	8	40.000.000,00	33.223.135,00	18	22
7	4798.FAE.002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	37.092.000,00	27.620.890,00	167	132	37.092.000,00	27.620.890,00	167	202
8	4798.FAE.003 Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	117.036.000,00	113.367.759,00	1.043	717	117.036.000,00	113.367.759,00	1.043	1252
9	4798.FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	720.000,00	120.000,00	1	4	720.000,00	120.000,00	1	4
10	4798.FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	3.240.000,00	3.240.000,00	1	1	3.240.000,00	3.240.000,00	1	2
11	4798.FAE.007 Pengalihan Potensi Lelang	60.000.000,00	42.249.225,00	1	5	60.000.000,00	42.249.225,00	1	5
12	4798.FAE.301 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipkatkan (PU)	20.616.000,00	13.544.000,00	412	270	20.616.000,00	13.544.000,00	412	495
13	4798.FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	0	0	-	0	0	0	-	0
14	4798.UAK.201 Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	0	0	-	0	0	0	-	0
15	4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	7.110.000,00	4.641.890,00	5	5	7.110.000,00	4.641.890,00	5	6
16	4701.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	-	0	0	0	-	0
17	4701.EBA.002 Kerumahantagaan	79.272.000,00	67.658.876,00	12	9	79.272.000,00	67.658.876,00	12	12
18	4701.EBA.994 Layanan Perkantoran	966.658.000,00	870.501.901,00	12	9	966.658.000,00	870.501.901,00	12	12
19	4701.EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	27.172.000,00	26.846.000,00	3	3	27.172.000,00	26.846.000,00	3	3
20	4701.EBB.003 Kendaraan Bermotor	382.400.000,00	382.400.000,00	1	1	382.400.000,00	382.400.000,00	1	1
21	4701.EBB.004 Gedung/Bangunan	307.583.000,00	304.785.190,00	439	439	307.583.000,00	304.785.190,00	439	439
22	4702.BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	0	0	-	0	0	0	-	0
23	4702.BMB.002 Kehumasan	39.876.000,00	35.424.429,00	2	6	39.876.000,00	35.424.429,00	2	8
24	4702.BMB.003 Pameran/Eksibisi	0	0	-	0	0	0	-	0
25	4704.EBA.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	50.288.000,00	29.382.906,00	5	5	50.288.000,00	29.382.906,00	5	7
TOTAL		2.245.199.000	2.044.362.195			2.245.199.000	2.044.362.195		

2. Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Sesuai PMK Nomor 22/PMK.02/2021

a. Data Bobot dan Capaian IKPA

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Bobot Indikator	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA	Bobot Indikator	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA	Bobot Indikator	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA	Bobot Indikator	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA
1 Revisi DIPA	10	100,00	100,00	10	100,00	100,00	10	100,00	100,00	10	100	100
2 Hal III DIPA	10	100,00	100,00	10	100,00	100,00	10	100,00	100,00	10	100	100
3 Penyerapan Anggaran	20	100,00	100,00	20	98,03	98,03	20	98,09	98,09	20	98.57	98.57
4 Belanja Kontraktual	10	100,00	100,00	10	100,00	100,00	10	94,00	94,00	10	94	94
5 Penyelesaian Tagihan	10	100,00	100,00	10	100,00	100,00	10	100,00	100,00	10	100	100
6 Pengelolaan UP dan TUP	10	100,00	100,00	10	100,00	100,00	10	99,08	99,08	10	99.33	99.33
7 Dispensasi SPM	5	100,00	100,00	5	100,00	100,00	5	100,00	100,00	5	100	100
8 Capaian Output	25	89.50	89.50	25	96,49	96,49	25	98,45	98,45	25	100	100
Total Nilai Akhir IKPA		97.38			98.73			98.54			99.05	

b. Nilai SMART DJA

Capaian SMART DJA per 31 Desember 2023
94.16

3. Konsistensi Rencana Penarikan Dana

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 015.09.2.538044/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON													
		RENCANA PENARIKAN DANA	43.958	485.493	107.371	172.417	102.386	97.747	168.740	92.230	273.125	101.173	132.609	467.949	2.245.199
		BELANJA BARANG	43.958	103.093	80.525	143.907	102.386	97.747	93.963	92.230	71.627	101.173	132.609	464.826	1.528.044
		BELANJA MODAL	0	382.400	26.846	28.510	0	0	74.777	0	201.498	0	0	3.124	717.155
	015.09.CD.4790	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	0	0	0	0	1.984	774	0	0	0	0	3.290	4.856	10.904
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	1.984	774	0	0	0	0	3.290	4.856	10.904
	015.09.CD.4798	Pengelolaan Aset	6.528	6.968	20.564	11.912	40.125	30.152	17.361	13.303	13.500	16.743	45.618	151.170	373.936
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	6.528	6.968	20.564	11.912	40.125	30.152	17.361	13.303	13.500	16.743	45.618	151.170	373.936
	015.09.WA.4700	Legislasi dan Litigasi	0	240	480	120	0	948	0	0	0	0	0	5.322	7.110
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	240	480	120	0	948	0	0	0	0	0	5.322	7.110
	015.09.WA.4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	36.702	478.053	86.307	160.025	56.017	53.094	141.234	78.447	258.002	72.931	72.489	269.883	1.763.085
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	36.702	95.653	59.361	131.515	56.017	53.094	86.457	78.447	56.505	72.931	72.489	266.759	1.045.930
	015.09.WA.4702	53 BELANJA MODAL	0	382.400	26.846	28.510	0	0	74.777	0	201.498	0	0	3.124	717.155
		Pengelolaan komunikasi dan Informasi publik	728	120	120	240	3.476	12.780	5.596	480	1.622	7.620	1.681	5.412	39.876
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	728	120	120	240	3.476	12.780	5.596	480	1.622	7.620	1.681	5.412	39.876
	015.09.WA.4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	0	126	0	126	784	0	4.547	0	0	3.880	9.530	31.307	50.286

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 015.09.2.538044/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Halaman : III_2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG		128		128	784		4.547			3.886	9.530	31.307	50.288
		PERKIRAAN PENERIMAAN	163.879	163.879	163.879	163.879	163.879	163.879	163.879	163.879	163.879	163.879	163.879	163.911	1.966.586
		- PNBP (425122)	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.337	16.000
		- PNBP (425129)	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	7.000
		- PNBP (425131)	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	299	3.500
		- PNBP (425782)	44.833	44.833	44.833	44.833	44.833	44.833	44.833	44.833	44.833	44.833	44.833	44.837	538.000
		- PNBP (425784)	115.583	115.583	115.583	115.583	115.583	115.583	115.583	115.583	115.583	115.583	115.583	115.587	1.387.000
		- PNBP (425785)	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.264	15.080

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

ttd.
RIONALD SILABAN
NIP 190604231990101001

4. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A) Nilai IKPA		
1	Revisi DIPA	100,00
2	Hal III DIPA	100,00
3	Penyerapan Anggaran	100,00
4	Belanja Kontraktual	100,00
5	Penyelesaian Tagihan	100,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	100,00
7	Dispensasi SPM	100,00
8	Capaian Output	89.50
B) Nilai SMART		
Capaian Triwulan I		97.38

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A) Nilai IKPA		
1	Revisi DIPA	100,00
2	Hal III DIPA	100,00
3	Penyerapan Anggaran	98,03
4	Belanja Kontraktual	100,00
5	Penyelesaian Tagihan	100,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	100,00
7	Dispensasi SPM	100,00
8	Capaian Output	96,49
B) Nilai SMART		
Capaian Triwulan II		98.73

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A) Nilai IKPA		
1	Revisi DIPA	100,00
2	Hal III DIPA	100,00
3	Penyerapan Anggaran	98,09
4	Belanja Kontraktual	94,00
5	Penyelesaian Tagihan	100,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	99,08
7	Dispensasi SPM	100,00
8	Capaian Output	98,45
B) Nilai SMART		
Capaian Triwulan III		98.54

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A) Nilai IKPA		
1	Revisi DIPA	100
2	Hal III DIPA	100
3	Penyerapan Anggaran	98.57
4	Belanja Kontraktual	94
5	Penyelesaian Tagihan	100
6	Pengelolaan UP dan TUP	99.33
7	Dispensasi SPM	100
8	Capaian Output	100
B) Nilai SMART		
Capaian Triwulan IV		99.05



BAB IV | Penutup



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Ambon ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Ambon sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Ambon ditetapkan berdasarkan peta strategis Kemekeu- Three yang terdiri dari 11 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah disampaikan pada BAB III. rata-rata pencapaian kinerja KPKNL Ambon (NKO) tahun 2023 sebesar 114,23% yang berarti pencapaian kinerja di atas 100%. Dari 19 IKU yang ditetapkan berwarna hijau dan 1 IKU yang di tetapkan berwarna kuning. Pencapaian NKO sedikit mengalami penurunan dari tahun 2022, demikian keberhasilan maupun tantangan yang dicapai oleh KPKNL Ambon sudah menunjukkan bahwa telah semakin dihayati dan dilaksanakannya nilai-nilai Kementerian Keuangan oleh seluruh jajaran KPKNL Ambon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.

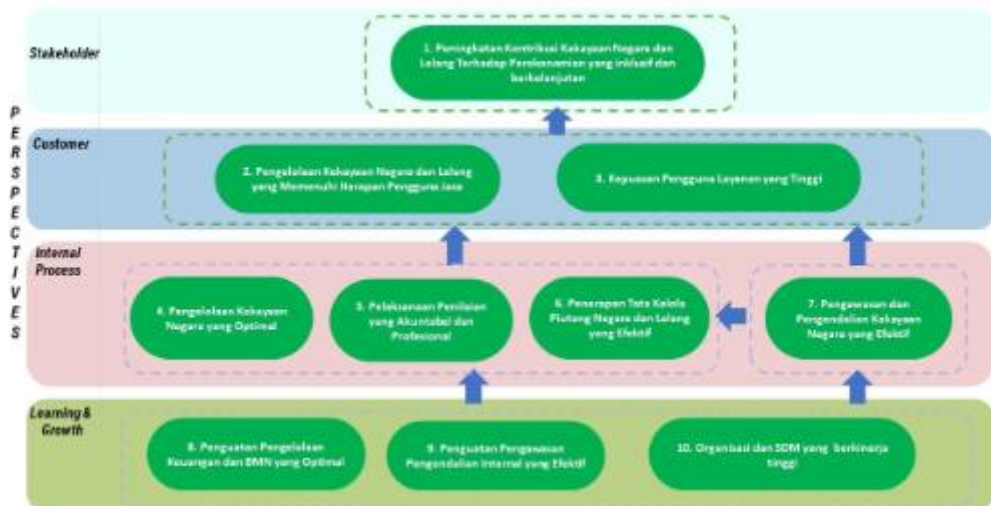
Adanya masalah/kendala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan pada BAB I. bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak berbuat yang terbaik bagi organisasi. dengan bekerja lebih giat lagi serta terus menerus mengamalkan nilai-nilai dari Kementerian Keuangan. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik. bahkan terus berusaha untuk meningkatkannya.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
TAHUN 2023**



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-01/WKN.17/2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4c-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		4d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		5b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang secara Online	90%
		6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	7a-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	9a-CP	Indeks Integritas Organisasi	94,33
		9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		10b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

Program/ Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp	384.840.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	10.904.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	-
3. Pengelolaan Aset	Rp	373.936.000
5. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp	-
6. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp	-
7. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	-
Dukungan Manajemen	Rp	1.860.359.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	7.110.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.763.085.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	39.876.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	-
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	50.288.000
6. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp	-

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Ambon



Ditandatangani Secara Elektronik
Iwan Victor Leonardo

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
AMBON
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

No	SS/IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan .								
	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
	2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi								
	3a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal								
	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipkatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
	4b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	4c-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
	4d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	5b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
6	Penguatan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online	57%	67%	67%	78%	78%	90%	90%
	6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif								
	7a-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan	-	50%	50%	-	50%	86%	86%

No	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
	Pengelolaan Barang Milik Negara							
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
	8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	9a-CP Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,33	94,33
	9b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	-	-	-	60	60
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	10a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
	10b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelana Ambon.



Ditandatangani secara elektronik
Iwan Victor Leonardo

**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa IKI : Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	Melakukan penelusuran ulang atas berkas Piutang Negara dengan kondisi PSBDT	1. Menurunkan nilai outstanding Piutang Negara Meningkatkan biaya administrasi dari Piutang Negara	TW I : PSBDT, angsuran TW II : Penggalian Potensi, angsuran TW III: PSBDT, angsuran TW IV : Intensifikasi penagihan, angsuran	TW I : Penurunan Outstanding, biad TW II : Penurunan Outstanding, biad TW III : Penurunan Outstanding, biad TW IV : Penurunan Outstanding, biad	Q1 s.d Q4 Tahun 2023	Seksi Piutang Negara	40.584.000
2	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal IKI : Persentase Bidang tanah	Melakukan koordinasi percepatan pelaksanaan sertifikasi BMN dengan BPN dan PJJN	Percepatan penerbitan Sertipikat BMN berupa tanah sebanyak target yang di tetapkan	TW I : Koordinasi Penyampaian Target TW II : Monitoring Capaian TW III: Monitoring Capaian s.d. TW III	TW I : Surat ke Satker dan Rakor TW II : Rakor dengan Satker TW III : Rakor Capaian s.d. TW III	Q1 s.d Q4 Tahun 2023	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	20.616.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	BMN yang disertifikasi			TW IV : Monitoring Capaian s.d. TW IV	TW IV : Rakor Capaian s.d. TW IV			
3	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal IKI : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	Melakukan koordinasi percepatan pelaksanaan SBSK yang berada pada Satker yang menjadi Target di Tahun 2023	Penyelesaian evaluasi kinerja BMN secara efektif dan efisien	TW I : Koordinasi Penyampaian Target TW II : Monitoring Capaian s.d. TW II TW III: Monitoring Capaian s.d. TW III TW IV : Monitoring Capaian s.d. TW IV	TW I : Surat ke Satker TW II : Laporan Capaian TW II ke Seksi KI TW III : Laporan Capaian TW III ke Seksi KI TW IV : Laporan Capaian TW IV ke Seksi KI	Q1 s.d Q4 Tahun 2023	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	115.596.000
4	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal IKI : Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Melakukan focus pengambilan data dan dokumen BMN pada satu Satuan Kerja sesuai jumlah target	Penyelesaian evaluasi kinerja BMN secara efektif dan efisien	TW I : Koordinasi Penyampaian Target TW II : Monitoring Capaian s.d. TW II TW III: Monitoring Capaian s.d. TW III TW IV :	TW I : Surat ke Satker TW II : Laporan Capaian TW II ke Seksi KI TW III : Laporan Capaian TW III ke Seksi KI TW IV :	Q1 s.d Q4 Tahun 2023	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	38.532.000



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Monitoring Capaian s.d. TW IV	Laporan Capaian TW IV ke Seksi KI			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelana Ambon



Ditandatangani secara elektronik
Iwan Victor Leonardo





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

DANKE



"Sukses bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, kamu akan sukses"

Albert Schweitzer

